

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Studi ini menarik untuk dikaji mengingat dominasi Partai Golongan Karya atau biasa disebut Golkar di Kabupaten Bone sudah berjalan sejak lama dan menghasilkan dampak-dampak lain dari proses konsolidasi demokrasi dan tatanan politik. Bahwasanya Partai Golkar di Kabupaten Bone semenjak era reformasi hingga saat ini senantiasa tampil sebagai Partai pemenang dengan perolehan suara terbanyak dari Partai-Partai lainya. Dalam studi ini lebih tertuju pada bentuk dan dampak dominasi Partai Golkar di Kabupaten Bone, sebab Partai Golkar selalu dan selalu meraih kursi terbanyak dan suara terbanyak pada perhelatan politik baik dalam pemilihan Kepala Daerah maupun pemilihan Legislatif.

Namun demikian jika melihat kacamata demokrasi, demokrasi pada umumnya adalah pemerintah berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, dengan demikian dalam demokrasi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam terbentuknya sebuah pemerintahan. Negara dalam sistem ini adalah milik rakyat seluruhnya. Hak-hak politik sistem ini mengharuskan Partai politik lebih dari satu hingga rakyat memiliki alternatif pilihan. Demokrasi juga menganut ideologi terbuka baik pemikiran masyarakat, tentang politik, ekonomi, sosial budaya dan

bahkan dapat disalurkan melalui karya-karya ilmiah, media pers ataupun melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat.

Berangkat dari kesenjangan demokrasi kita di Indonesia pasca reformasi Golkar akan kehilangan kekuatan untuk mempertahankan kemenangannya. Setelah lebih dari tiga dekade (dasawarsa) menikmati kekuasaan, mesin kekuasaan di era orde baru dikenal kokoh dan kuat dalam hal kemenangan pemilu, namun era reformasi harus menghadapi gelombang politik. Gerakan reformasi semakin kuat setelah lengsernya seorang presiden Soeharto dari kepemimpinannya sehingga kran demokrasi terbuka untuk para masyarakat maupun politisi untuk memperjuangkan hak-haknya. Masa lengsernya Soeharto karena tuduhan krisis ekonomi dan krisis moneter tanpa bisa diatasi oleh pemerintah Soeharto maka masyarakat meminta perubahan dan babak baru yang lebih demokratis. Setelah terbuka peluang masyarakat untuk ikut berpartisipasi berdemokrasi maka kejayaan Golkar pada era reformasi dipukul mundur dan seakan kehilangan haluan politik. Namun untuk skala nasional Golkar tidak lagi menjadi pilihan rakyat dan seakan kehilangan kepercayaan oleh rakyat akan tetapi lain hal yang terjadi di beberapa daerah salah satunya Kabupaten Bone selalu dikenang manis karya-karya yang telah dibuat oleh Pak Soeharto pada masa pemerintahannya.

Adapun unsur-unsur kekuasaan/dominasi Golkar yang masih bisa dipertahankan di Kabupaten Bone. **pertama** bisa mendominasi kekuasaan dalam hal ini kekuatan agar pengikut bisa bertahan dan menyebarkan

kekuatan Partai terhadap kader-kader Partai manapun pengikutnya, strategi yang digunakan Golkar untuk mempertahankan massa sampai sekarang yaitu memanfaatkan efek orde baru dimana keterlibatan dari tokoh-tokoh masyarakat masih mengakar sampai kebawah dan masih digunakan sampai sekarang, contohnya mulai kepala desa, tokoh-tokoh agama, kelompok petani, komunitas nelayan, pemuda, dan kepala dusun merupakan simpatisan dari Golkar. Poin **kedua** untuk mendominasi politik yang dikedepankan skil untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain agar dapat diikuti parpol yang ditawarnya, maka sama halnya pada perilaku elit-elit politik Golkar di Bone memperbanyak dengan kegiatan-kegiatan sosial kemudian beradaptasi langsung dengan masyarakat dan mencoba menawari program yang pro terhadap masyarakat. Kegiatan sosial ini juga dibarengi kepentingan politik sehingga kedepannya ikut berpartisipasi untuk memenagkan Golkar pada pemilu yang akan datang. Yang **ketiga** sosok kepemimpinan dibutuhkan masyarakat Bone yang memiliki figur kuat, pengalaman, wawasan, dan bangsawan. Maka inilah menjadi tolak ukur untuk mempertahankan kekuasaan dan dominasi politik Partai Golkar di Bone. Kekuasaan Golkar di Bone tidak terlepas dengan dukungan kader-kader terbaiknya yaitu dengan memiliki kualitas, wawasan dan yang memiliki garis keturunan raja atau *Arung*. Dengan gelar kebangsawananya yaitu *andi, petta, daeng dan puang* sehingga dari kader-kader Golkar rata-rata memiliki figur yang kuat, kemudian memiliki wawasan yang lebih luas dan memiliki pengalaman politik yang luar biasa.

Kemudian Golkar juga merupakan Partai yang mayoritas kadernya memiliki keturunan darahh biru atau *Arung* dan ini masih sampai sekarang. Dalam pola pikir masyarakat bahwa pemimpin kita alangkah baiknya yang bergelar *Andi* atau *puang* yang merupakan garis keturunan bangsawan sehingga secara *histori* mantan Bupati Bone mayoritas dari kaum bangsawan. Inilah beberapa unsur-unsur untuk mempertahankan kekuasaan Partai Golkar di Kabupaten Bone. Kekuasaan politik juga merupakan bagian dari kekuasaan sosial, birokrasi dan politik. inilah ciri-ciri yang harus diambil fokus pada pemerintah daerah yakni memiliki kekuatan disuatu daerah untuk tetap menjadi penguasa yang bisa dibawa ke masa depan Partai, paling otoritatif yaitu sebagai pemegang kekuasaan harus tetap bersikap otoriter agar tetap menjadi penguasa yang tidak dapat dicampur adukan dengan kepentingan-kepentingan lain diluar kepentingan Partai.

Statistik kemenangan Partai Golkar di Kabupaten Bone disetiap pemilu pasca reformasi mulai tahun 1999, 2004, 2009 hingga 2014. Pada pemilihan umum 1999 antara lain bisa dilihat kemenangan Partai Golkar di DPRD ditandai dengan mendapatkan 44 kursi ditingkat provinsi, di Makassar Partai Golkar mendapatkan 22 kursi DPRD tingkat kota, sedangkan keunggulan Partai Golkar lebih dominan di Kabupaten Bone dengan meraih 31 kursi dari 45 kursi. Pada pemilu 2004 Golkar kembali memenangkan secara mutlak di Kabupaten Bone dengan perolehan 28 kursi dari 45 kursi. Pada tahun 2009 Partai Golkar meraih 18 kursi dari 45

kursi. Sedangkan hasil rekapitulasi perolehan kursi dalam pemilu 2014 di Kabupaten Bone Partai Golkar masih dominan dengan mendapatkan 15 kursi dari 45 kursi (KPUD Bone).

Data ini menunjukkan Partai Golkar di Makassar dan Bone tetap unggul meskipun trennya menurun. Berdasarkan data tersebut menunjukkan mesin politik Partai Golkar di Kabupaten Bone masih dominan dari pada di kota Makassar. Dari fenomena diatas dapat dilihat bahwa efektifitas kemenangan Partai Golkar terletak pada masyarakat terbelakang atau pinggiran dan sebaliknya Golkar semakin lemah pada wilayah perkotaan yang penduduknya memiliki rata-rata bersikap kritis (Syamsuddin Haris: 2005).

Dominasi kemenangan Golkar di Kabupaten Bone juga terjadi pada setiap pemilihan kepala daerah. Dimana calon kepala daerah yang diusung dari Partai Golkar serta koalisinya selalu mendapatkan suara terbanyak dari calon yang diusung dari Partai lain. Statistik kemenangan calon dari Partai Golkar sesuai data KPUD Kabupaten Bone mulai tahun 2008 pasangan H. A. Muh Idris Galigo, SH dan Dra. H. M. Said Pabbokori dari Partai Golkar 56% suara dari 3 kandidat bakal calon Bupati. Pada tahun 2013 pasangan Andi Fashar Fadjalangi dan Ambo Dalle diusung dari Partai Golkar meraih 47% suara dari 6 bakal calon Bupati. Dan pada tahun 2018 dengan melawan kotak kosong pasangan dari calon *Incumbent* yaitu Andi Fashar Fadjalangi dan Ambo Dalle berhasil meraih 62% suara. Tentu kekuatan Golkar masih memegang

kekuasaan sampai saat ini. Faktor yang mempengaruhi adalah adanya efek orde baru dimana masyarakat tradisional masih digugah dengan Partai pohon beringin itu atau biasa disebut Partai masyarakat (kuning) yang pro terhadap masyarakat, kemudian adanya pemilih parteneralistik yang merupakan kekuatan politik Golkar pada orde baru yang mengakar sampai kebawah itu masih digunakan dan dijaga sampai sekarang. Sehingga pada tahun 2013 ada perebutan dari elit-elit Golkar untuk diusung sebagai bakal calon Bupati pada saat itu maka terjadi perpecahan internal Partai Golkar akan tetapi tidak berkepanjangan dan bisa diselesaikan dengan cepat.

Pada tahun 2013 terjadi dilematis di internal Partai Golkar Bone karena diminati enam orang kandidat calon Bupati dan masing-masing merupakan kader Golkar. Keenam kandidat tersebut adalah Andi Mangunsidi Massarapi, Andi Fahzar M. Padjalangi, Andi Irsan Idris Galigo, Andi Sultan Pawi, Andi Syamsiar Rosalim, dan Ambo Dalle (Alfiati: 2013). Penetapan calon Bupati tersebut digelar pada rapat pleno DPP Partai Golkar. Yang keluar sebagai kandidat calon Bupati yang diusung dari Golkar pada saat itu adalah Andi Fashar Fadjalangi keputusan ini disepakati berdasarkan hasil survei eksternal dari Golkar. Dari hasil keputusan tersebut Golkar memang memiliki kekuatan tersendiri untuk menentukan siapa bakal calon yang akan layak diusung. Maka dari kekuasaan Golkar tersebut dari beberapa elit-elit politik Bone harus mengakui bahwa Golkar memiliki hegemoni tersendiri atas kekuasaannya di Kabupaten Bone.

Dominasi Partai Golkar dalam dinamika politik yang ada di Kabupaten Bone membuat elit politik harus menjadikan Golkar sebagai kendarahan politiknya untuk bisa menduduki bangku pemerintahan. Dengan massa dan simpatisan Partai yang banyak sehingga perebutan untuk menjadi bakal calon dari Partai Golkar harus bersaing secara ketat untuk pemilihan eksekutif dan legislatif. Tentu ini menjadi tolak ukur bahwa Partai Golkar memiliki hegemoni kekuasaan untuk menentukan siapa yang akan layak menjadi pemerintah daerah Bone. Namun untuk rana legislatif data yang ada Golkar dominan mendapatkan kursi terbanyak pada setiap pileg meskipun data yang ada dikatakan menurun meraih kursi tetapi kekuatan Golkar masih tetap bisa mempertahankan eksistensinya keluar sebagai pemenang.

Maka dalam hal ini apabila Golkar di Kabupaten Bone terus dominasi kemenangan akan ada dampak terhadap masyarakat, baik itu dampak sosial, politik maupun kekuasaan atau jabatan apabila ini terus-menerus. Mencederai ruang gerak demokrasi. a.) masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk mengusungkan diri maju dalam pemilu karena hak yang diprioritaskan kader dan simpatisan Partai Golkar, b.) akan terjadi politik dinasti atau kekerabatan karena para politisi akan menarik keluarga dan orang terdekatnya untuk diusungkan oleh Partai Golkar atau ditarik menjadi birokrasi pemerintahan c.) pemerintah daerah yang diusungkan dari Partai Golkar harus tunduk pada Partai dengan

bahwasanya kepentingan Partai akan menjadi prioritas dari pada kepentingan rakyat.

Jika melihat tatanan politik di Bone maka kita perlu melihat kembali history terbentuknya Partai politik. Partai politik kembali kepada arus sejarah kelahirannya maka nilai-nilai kebenaran akan terjadi, untuk mencapai cita-cita politik yang mulia yaitu membangun masyarakat yang aman dan sejahtera. Arah Partai politik sebenarnya jika konsisten pada fungsinya sebagai kendarahan politik, Partai Politik akan menjadi instrument stabilitas politik yang efektif. Karena peran dan fungsi Partai politik sangat penting untuk keberlangsungan dalam proses demokrasi, negara bisa saja terjadi destibilisasi politik jika tanpa Partai politik. Namun Partai politik saat ini hanya sekedar memobilisasi kader Partai untuk menuju pesta demokrasi yang sengaja ditampilkan untuk mencapai kepentingan tertentu. Ketika kekuasaan itu diraih maka Partai politik hanya mengarah pada dominasi politik, sosial dan birokarasi terhadap masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk dominasi Partai Golkar di Kabupaten Bone pasca reformasi ?
2. Bagaimana dampak dominasi Partai Golkar terhadap masyarakat dan elit politik di Kabupaten Bone pasca reformasi ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**



1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dominasi Partai Golkar di Kabupaten Bone pasca reformasi
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dominasi Partai Golkar terhadap masyarakat di Kabupaten Bone pasca reformasi
3. Secara akademis dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan tentang dominasi Partai Golkar di Kabupaten Bone.
4. Secara teorititis dapat memberikan acuan penelitian selanjutnya dengan kasus yang sama atau sejenis.

#### **D. Literatur Review**

Menurut Ardipandanto (2016) pada penelitian “Efektifitas Strategi Pencitraan Partai Golkar, PDIP Dan PKS Pada pemilu 2009” Pada pemilu 2009 Partai Golkar, PDIP dan PKS melakukan pencitraan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Untuk Golkar sendiri melakukan strategi dengan pendekatan secara emosional terhadap masyarakat secara langsung turun ke masyarakat bahwa Golkar adalah pilihan rakyat semenjak pemilu 2004 tetap menjadi Partai yang mendominasi massa maka dari itu untuk tetap menjaga massa Partai mereka melakukan bakti sosial sebagai cara untuk menjaga massa dan efektif untuk mempertahankan simpatisan Partai. Dengan hasil yang diperoleh Partai Golkar pada tahun 2009 menunjukkan bahwa Golkar sebagai Partai penguasa. Cara ini juga digunakan dalam strategi Golkar di Kabupaten Bone untuk memenangkan Golkar pada setiap pesta demokrasi dalam hal ini pada setiap pemilihan baik legislatif maupun eksekutif. Perbedaan

dasar dengan penelitian ini dengan penilitan penulis yaitu strategi dari masing-masing partai memiliki ruang yang sama untuk memperjuangkan massanya.

Menurut Titin (2013) Politik Kekerabatan Dalam Politik Lokal Di Sulawesi Selatan Pada Era Reformasi (Studi Tentang Rekrutmen Politik Pada Partai Golkar, Partai Amanat Nasional Dan Partai Demokrat Sulawesi Selatan Tahun 2009). Pola penjaringan yang dilakukan oleh Partai Golkar lebih kepada membangun dinasti yaitu dinasti Yasin Limpo yang ada di Kabupaten Gowa. Sehingga adanya kepentingan dari masyarakat terhadap Partai Golkar karena sudah menyentuh politik dinasti melalui kaderisasi dari Partai Golkar, setiap bakal calon yang diusung pada pemilukada mayoritas keluarga Syahrul Yasin Limpo ini duduk dibangku Legislatif menunjukkan hal yang negative. karena ada politik dinasti didalam Golkar maka kader-kader dan masyarakat meminta alangkah baiknya yang diprioritaskan yang berkompeten bukan mereka yang memiliki hubungan darah dengan penguasa. Studi ini memiliki Gambaran yang sama terkait kuatnya suatu klan disuatu daerah sehingga klan tersebut yang menjadi panutan bagi masyarakat untuk berlaga di kompitisi setiap pemilu. Kuatnya Golkar di Bone memiliki peran tersendiri untuk menentukan bakal calon yang akan diusung dari Golkar sehingga terjadi persaingan klan-klan politik besar di Kabupaten Bone karena berharap Golkar yang mangantarkannya untuk duduk sebagai

pemerintah daerah. Perbedaan yang terletak dengan penelitian ini klan SYL subur-subur saja dalam membangun dinasti politik.

Menurut Candra (2014) Kekuatan Politik Lokal Dalam Pemenangan Syahrul Yasin Limpo (SYL) Pada Pemilihan Gubernur 2013 Daerah Pemilihan Kabupaten Gowa. Kabupaten Gowa sebagai daerah geografis Partai Golkar di anggap paling berpotensi memenangkan Pemilu. Partai penguasa sejak masa pemerintahan Soeharto ini sangat di agung-agungkan oleh masyarakat, dimana mereka menganggap Partai ini adalah Partai pemerintah yang dapat membawa pemerintahan daerah mereka ke arah yang lebih baik. Pada kesempatan yang sama yang dimiliki oleh para politisi Kabupaten Gowa juga didukung figur Syahrul Yasin Limpo yang memiliki kualitas dan memiliki pengalaman yang baik terhadap masyarakat Gowa. Maka dari itu Golkar di daerah Kabupaten Gowa memiliki potensi yang sangat besar karena Golkar belum pernah tergantikan semenjak orde baru Golkar sebagai Partai penguasa. Maka dari sini terdapat fakta menarik bahwa Golkar adanya efek kekuasaan Orde baru di Gowa juga adanya pengaruh figur dari SYL maka tidak heran di Kabupaten Gowa sudah mendarah daging Partai Golkar dengan masyarakat. Maka kesempatan itu dimanfaatkan Golkar dengan menanamkan pola pikir yang lama bahwa Golkar telah memberikan kontribusi besar kepada masyarakat Gowa. Penelitian sebelumnya ada kesamaan dalam kemenangan Golkar di Kabupaten Bone yaitu menggunakan efek orde baru yang masih mengagung-agungkan satu nama

yang populer dimata masyarakat seperti halnya JK dan NH pada pasca reformasi masih memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi politik praktis yang ada di Bone. Letak perbedaanya adalah jika klan politik di Gowa SYL pernah ikut serta dalam kabinet kerja soeharto dan diagungkan sampai sekarang. Di Bone sendiri JK dan NH yang menjadi tokoh Golkar di mata masyarakat dari pasca reformasi sampai sekarang karna memang pernah berkiprah dikanca nasional.

Menurut Alfianti (2013) Dinamika Penetapan Calon Bupati dari Partai Golkar di Kabupaten Bone Periode 2013-2018. Partai Golkar Bone menjadi incaran enam orang kandidat Bupati. Keenam kandidat tersebut adalah, Andi Mangunsidi Massarapi, Andi Fahzar M. Padjalangi, Andi Irsan Idris Galigo, Andi Sultan Pawi, Andi Syamsiar Rosalim, dan Ambo Dalle. Penetapan calon Bupati tersebut digelar pada rapat pleno DPP Partai Golkar. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas ada kekuatan Partai Golkar dalam menentukan suatu bakal calon. Namun untuk melihat strategi yang digunakan kurang lebih dengan mengadakan efek orde baru dengan tertanamnya pola pikir masyarakat. Disisi lain strategi yang digunakan sebelum penetapan adalah sistem survei eksternal dari tim Golkar. Penelitian ini berkesinambungan dalam penelitian penulis terkait bagaimana dinamika persaingan politik klan internal Golkar di Kabupaten Bone, penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana tekanan politik oleh klan Halid untuk memperjuangkan klan Fadjalangi dalam menyaingi klan Galigo agar lengser dari politik hirarki yang dibangun dari klan Galigo

untuk Golkar. Perbedaan penelitian ini lebih kepada penjelasan bagaimana dinamika penetapan calon yang diusung dari Golkar dengan melihat siapa yang mendominasi sosial di Golkar jadi memang ada persaingan politik klan dikubuh Golkar itu sendiri. Kemudian penelitian penulis lebih menjelaskan dari bagaimana Golkar dipandang dari aspek dominasi politik, birokrasi dan sosial.

Menurut Mujahidin (2012) Pasang Surut Polarisasi Elit di Dalam Etnis Bugis dan Makassar. Dominasi Golkar sebagai Partai yang paling berkuasa pada rejim Orde Baru mulai berkurang, dan muncul Partai alternatif seperti Partai Demokrat, PKB dan PAN. Merosotnya kekuatan Partai Golkar mengubah peta politik pada kancan nasional maupun daerah. Arena politik semakin terbuka. Politik bukan lagi milik dominasi tentara, birokrat dan Golkar. Kenyataan ini berbeda dengan yang terjadi pada etnis Bugis Bone. Elit Bone produk aristokrasi masih bertahan sebagai elit hingga Orde reformasi. Klan yang paling disegani di Bone adalah klan Arung Tarasu. Klan inilah yang kemudian melahirkan sejumlah nama besar yang menguasai Bone hingga kancan nasional. Panilitian mencoba menggambarkan bagaimana partai-partai baru dalam menyusun strategi untuk memenagkan partainya namun langkah itu masih bergulir di daerah perkotaan karna faktor tingkat kesadaran berpolitik oleh masyarakat. Penelitian inu juga menjelaskan pasca reformasi masyarakat bebas menentukan pilihan namun di Bone itu sendiri dari klan Arung Tasaru tidak dapat dilengserkan di Bone karna melahirkan elit-elit politik

yang tingkat reting populeritasnya tinggi dimata masyarakat. Sehingga kesamaan dalam penelitian penulis adalah dugma masyarakat tentang kepemimpinan yang layak menjadi pemimpin di Kabupaten Bone harus dari garis keturunan bangsawan. Perbedaanya adalah objek penelitian bahwa suku bugis bukan sebatas membahas lingkaran kabupaten Bone akan tetapi dari sudut pandang dari penlitian ini membahas keseluruhan di etnis bugis di Sulawesi Selatan.

Menurut Nurlatifah (2015) Kekuatan Partai PPP sebagai Partai penguasa dikota Tasikmalaya karena menset yang tertanam dimasyarakat bahwa kyai adalah salah satu elit yang memiliki kedudukan yang terhormat dan memiliki pengaruh yang besar pada perkembnagan masyarakat. Karena ketokoan yang dimiliki oleh seorang kyai maka figur yang memiliki pengetahuan yang lebih luas dan mendalam mengenai ajaran islam. Secara teologis para kyai juga dipandang sebagai pewaris nabi. Maka dari itu tidak diherankan jika peran kyai sebagai sumber legitimasih masyarakat persoalan yang ada dimasyarakat. Sering memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan persoalan keagamaan dan juga aspek lain. Kemudian disini kita melihat pola kehidupan masyarakat di Tasikmalaya bergantung pada kedudukan kyai dalam aspek agama dan aspek sosial politik. Maka dengan ini peran dari kyai untuk kekuatan politik dan kekuasaannya tetap kokoh selama ada pola komunikasi yang baik terhadap kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini memiliki kaitan tentang Hegemoni kekuasaan dari partai

islam di Tasikmalaya dengan partai Golkar di Kabupaten Bone yaitu Golkar memiliki kendali untuk menentukan calon yang akan memimpin Bone kedepan, strategi yang digunakan adalah menjadikan tokoh masyarakat bagian dari simpatisan partai Golkar untuk ikut menyukseskan Golkar dalam perlehatan Politik ketika pesta demokrasi. Letak perbedaanya adalah dugma partai islam karna faktor kota santri akan tetapi di Bone dugma itu terbangun karna faktor efek orde baru.

Menurut Susilo Utomo (2013) mengutarakan kekuatan yang mendorong basis massa untuk selalu mengentarkan PDIP sebagai pemenang. Yaitu Soekarnoisme yang membentuk ajaran Tri Sakti Bung Karno. Strategi ini diklaim bahwa adanya kekuatan dalam memperjuangkan massanya semenjak tahun 1955 dan era reformasi ini. Figur dari kandidat calon selalu dijaga mulai kecerdasan sampai tulen dari seorang kader untuk terus memperjuangkan hak-hak pemilih kepada sang calon yang diiming-imingkan dari masyarakat. Pemilih merasa adanya “Romantisisme Soekarno” ini membuat mesin PDI-Perjuangan hidup dan bersinergi dengan masyarakat pemilihnya. Penelitian ini sedikit memiliki kesamaan dalam penelitian penulis yaitu ketika PDIP mengiming-imingkan ada kenangan manis dari perjuangan Soekarno, maka Golkar juga memiliki cara yang sama yaitu mencoba memabangun pola pikir masyarakat dengan mengingatkan kenangan manis Soeharto ketika mendukung pertanian kabupaten Bone dan hasil pertanian menjadi kebergantungan hidup masyarakat Bone. Penelitian ini lebih menjelaskan

bagaimana dogma soekarnoisme yang ditanamkan dari PDIP sedangkan di Kabupaten Bone Golkar menekankan dogma dengan mencoba mengingatkan kenangan manis yang persembahkan pak soeharto pada masa orde baru.

Dominasi Partai Politik Golkar di Gorontalo Pasca Era Reformasi Fenomena Fadel Muhammad dan Partai Politik Golkar di Gorontalo diurai dengan konsep Personalisasi. Dominasi Partai Golkar di Provinsi Gorontalo personalia dari Faadel Muhammad membawa pengaruh signifikan kinerja dari electoral Partai Golkar. Personalia yang telah didapatkan dari Fadel Muhammad akan menciptakan ketergantungan pada Partai Golkar. Hadirnya personalia Fadel Muhammad dibentuk dari system politik dan perilaku pemilih yang lebih memandang figur sehingga kekuatan dalam insitusi Partai Golkar lemah dalam kacamata politik. Kuatnya figur dari Fadel Muhammad juga dibentuk dari kacamata struktur sosial masyarakat yang memberikan dukungan (adat dan budaya) masyarakat Gorontalo. Personalia Fadel Muhammad dalam politik electoral terlihat dalam memanfaatkan jaringan politik. Rekomendasi calon dan sebagai magnet politik Golkar. Maka disatu sisi menjdai magnet electoral Partai Golkar untuk masa depan Golkar namun juga personalia ini menjadi ancaman serius bagi terhadap insitusi Partai Golkar jika tidak dikelola dengan baik. Penelitian ini memiliki fenomena yang sama di kabupaten Bone yaitu figure yang menjadi kekuatan Golkar untuk memenagkan pada setiap pemilu, namun ada perbedaan dari penelitian ini



Fadel Muhammad hanya satu-satunya figure yang dimiliki dari Golkar sedangkan di Kabupaten Bone banyak klan-klan politik memperbutkan Golkar untuk diusung dalam pemilukada. maka terbalik jika Golkar yang membutuhkan sosok fadel Muhammad untuk mempertahankan massanya di Gorontalo sedangkan di Bone elit-elit politik yang membutuhkan Golkar.

Menurut Ilham (2013) dalam tulisannya yaitu Hubungan Legislatif Eksekutif Dalam Proses Pembuatan Perda APBD Tahun 2013 Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam tubuh pemerintahan ketika berkaca dari teori trias politika bahwasanya dari ketiga lembaga pemerintahan memiliki tupoksi masing-masing untuk harapan adanya check and balance dalam tubuh pemerintahan namun berberda yang terjadi di Sul-Sel. karena factor adanya kekuasaan politik yang didominasi salah satu Partai besar yaitu Partai Golkar. Sehingga kader Golkar yang duduk di lembaga Legislatif maupun Eksekutif sangat sinergitas dari kedua lembaga besar tersebut. Kemudian praktek politik yang terjadi dimainkan oleh Partai yang mendominasi. Kekuatan yang dimiliki oleh Partai Golkar memiliki dampak buruk mencerminkan praktek kongkalikong antara lembaga eksekutif dan legislatif terlepas dari itu kepentingan yang dibawa tidak lain memenuhi kepentingan Partai penguasa. Jurnal tersebut jelas bahwa Partai yang memiliki anggota DPRD dan kepala daerah terbanyak adalah Golkar sebagai pemegang kekuasaan dipemerintahan Sul-Sel tidak terdapat check and balance antara DPRD dan Pemerintah Daerah karena

berasal kader yang sama sehingga adanya toleransi terhadap kepala pemerintah inilah dampak dari dominasi politik dan kekuasaan. Penelitian menjadi acuan penulis tentang sinergitas antara legislatif dan eksekutif ketika berasal dari partai yang sama. Peristiwa seperti ini tidak lasim dari sebagian pengamat politik di Indonesia karna fenomena seperti ini hampir terjadi di setiap daerah. Penulis akan menghubungkan antara penelitian ini dengan penelitian penulis tentang sinergitas DPRD dan Pemda di Bone dalam menentukan kebijakan faktor adanya sinergitas karna supporting antara keduanya saling memberi dukungan selama diatas kepentingan masyarakat akan tetapi yang lebih condong kepentingan partai. Perbedaannya hanya pada objek lokasi penelitian namun straginya sama,

Menurut Kaharuddin (2013) dalam tulisannya Kemenangan Partai Golongan Karya (GOLKAR) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Takalar 2012. Disisi lain factor yang mempengaruhi kemengan Partai Golakr pada setiap pemilikada adalah ideologi yang ada pada masyarakat adalah ideologi yang tua tertanam pada masyarakat Takalar masih percaya dengan melihat sisi history kemenagan Golkar diraih atas tiga aspek yaitu ABRI, PNS dan masyarakat sendiri. Bahwa masyarakat percaya dia dibesarkan oleh Partai Golkar, orang tuanya dibesrakan oleh Golkar sehingga anaknya tetap kepada Golkar dan sudah mendarah daging Partainya. Bahwa mereka merasa Golkar adalah pilihannya dan dibesarkan oleh Golkar dan memang selama ini mereka merasa belum perna dikecewakan oleh orang-orang Golkar. Penelitian ini

sesuai dengan pola Golkar di Kabupaten Bone yang masih digunakan sampai sekarang yaitu efek orde baru dengan menjaga massa melalui tokoh masyarakat sebagai simatisan partai. Strategi yang digunakan untuk memenangkan sama yang menjadi pembeda lokasi penelitian.

**Tabel.1.1 Literature Review**

No	Nama Penulis	Judul	Konten
1.	Arjoyati Ardipandanto, 2016	Efektifitas Strategi Pencitraan Partai Golkar, PDIP dan PKS pada pemilu 2009	Strategi Partai Golkar mempertahankan massa pada masyarakat Sulawesi Selatan. Melakukan pencitraan yaitu pendekatan emosional pada masyarakat dengan cara terjun langsung masyarakat bakti sosial. Ini merupakan strategi efektif untuk menjaga simpatisan Partai.
2.	Titin Purwaningsi, 2013	Politik kekerabatan dalam politik lokal di Sulawesi Selatan pada era reformasi (studi tentang rekrutmen politik pada Partai politik Golkar, PAN dan Partai Demokrat	Politik dinasti dalam tubuh keluarga para elit politik merupakan salah satu strategi untuk mempertahankan dominasi kekuasaan. Untuk tetap menjaga simpatisan Partai dilakukn dengan cara politik kekerabatan pada keluarga sendiri. Sehingga kekuatan Partai menjaga massanya yaitu menarik dari keluarga yang terdekat karena memiliki figur untuk layak dicalonkan dan siap berkompetisi dalam pesta demokrasi.
3.	Candra, 2014	Kekuatan Politik Lokal dalam Pemenangan Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Pemilihan	Pada masa pemerintahan Soeharto, Syahrul Yasin Limpo meniti karir dalam birokrasinya sehingga masyarakat Gowa sangat mengagung-agungkan

		Gubernur 2013 Daerah Kabupaten Gowa	<p>masa pemerintahan Soeharto karena putra daerah Gowa mengembangkan karirnya dipemerintahannya.</p> <p>Soeharto tidak terlepas dari figur Partai Golkar sehingga masyarakat Gowa sangat menggantungkan harapan kepada Golkar dalam hal ini kekuatan SYL saling ketergantungan dengan kekuatan Golkar untuk memenangkan pemilihan Gubernur tahun 2013.</p>
4.	Alfianti, 2013	Dinamika penepatan Partai Golkar di Kabupaten Bone Priode 2013-2018.	Hegemoni Partai Golkar di Kabupaten Bone berdampak buruk terhadap penetapan bakal calon Bupati di Bone karena untuk kendarahan para elit-elit politik harus ditentukan nasibnya dari Partai Golkar. Karena dari enam kandidat calon Bupati harus berkompetisi untuk mendapatkan Partai Golkar untuk diusung sebagai calon Bupati.
5.	Mujahidin, 2012	Pasang Surut Polarisasi Elit dalam Etnis Bugis dan Makassar	Kekuatan Golkar pasca reformasi tidak lagi menjadi dominan di Sulawesi Selatan karena adanya Partai-Partai masuk dan ikut berkompetisi dalam arena politik. Akan tetapi daerah Kabupaten Bone karena adanya klan

			yang melahirkan sejumlah nama besar. Adanya figur seorang kader Partai Golkar yaitu Jusuf Kalla (JK) dan Nurdin Halid (NH) masyarakat Bone lebih cenderung memilih Golkar karena berasal dari etnis Bugis Bone.
6.	Nurlatifah, 2015	Kyai dan Partai Islam dalam mempengaruhi perilaku mimilih masyarakat kota Tasikmalaya	Keterlibatan Kyai untuk mempengaruhi perilaku pemilih dengan membawa Partai yang berideologi Islam. Masyarakat memandang Kyai memiliki kedudukan yang terhormat dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemudian Tasikmalaya merupakan Kota santri untuk menjaga eksistensi keislaman Kota Tasikmalaya yaitu Kyai terlibat dalam politik. Agar masyarakat tetap memprioritaskan kegiatan-kegiatan keislaman.
7.	Makhasain, 2015	Orientasi Ideologi dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi dalam PILKADA Serentak Di Jawa Tengah 2015	Dominasi PDI-P di Jawa Tengah kekuatan mendorong massa keluar sebagai pemenang, yaitu adanya Soekarnoisme yang membentuk ajaran Tri Sakti Bung Karno. Semenjak 1955 sampai reformasi pemilih merasa adanya “Romantisisme Soekarno” sehingga PDIP

			sangat bersinergi dengan masyarakat Jawa Tengah.
8.		Fenomena Fadel Muhammad dan Partai Golkar diurai dengan konsep Personalisasi	Personalialia dari Fadel Muhammad membawa pengaruh signifikan kinerja dari elektoral Partai Golkar. Adanya personalialia Fadel Muhammad dibentuk dari sistem politik dan perilaku pemilih lebih memandang figur dari pada Partai. Maka hal ini bisa menjadi ancaman bagi Partai ketika tidak menjaga komunikasi dengan baik.
9.	Ilham, 2013	Hubungan Legislatif dan Eksekutif dalam Proses Pembuatan Perda APBD tahun 2013 Provinsi Sulawesi Selatan.	Dominasi Golkar dikursi Parlemen tidak adanya <i>Chek And Blance</i> antara Lembaga Eksukutif dan Legislatif karena berasal dari Partai yang sama. Maka hal tersebut yang lebih diprioritaskan kepentingan Partai dari pada kepentingan rakyat.
10.	Kaharuddin, 2013	Kemenangan Partai Golkar pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Takalar 2012	Faktor kemenangan Partai Golkar Di Takalar adalah <i>publik figur</i> dari Partai. Kemudian disisi lain masyarakat memiliki ideologi bahwa orang tua mereka telah dibesarkan oleh Partai Golkar. Selama masyarakat merasa tidak pernah dikecewakan oleh orang-orang Golkar.

*Diolah oleh penulis*

## **E. Karangka Teori**

### **1. Partai Politik**

#### **a. Pengertian Partai politik**

Partai politik parpol menurut Mirian Badiarjo merupakan organisasi politik yang menjadi sarana masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Di negara-negara yang berkembang maupun negara-negara maju parpol menjadi sebuah ikhtiar yang penting untuk menjadi sebuah sistem politik. Pendapat atau aspirasi seseorang atau kelompok akan hilang tak berbekas, apabila tak ditampung dan disalurkan sedemikian rupa maka terjadi ketimpangsuran pendapat dalam masyarakat menjadi lebih teratur pendapat dan sikap yang bermacam-macam tersebut perlu diolah dan dirumuskan didalam bentuk tuntutan atau usul kebijakan.

Menurut Anthony Downs (1957) Partai Politik adalah koalisi orang-orang yang berusaha menguasai aparat pemerintahan dengan cara-cara yang sah. Yang kita maksud dengan koalisi adalah sekelompok individu yang memiliki tujuan tertentu dengan yang sama dan saling bekerja sama untuk pencapaiannya. Yang kita maksud dengan aparat pemerintahan adalah perangkat fisik, hukum, dan kelembagaan yang digunakan pemerintah untuk



melaksanakan peran khusus dalam pembagian kerja. Yang dimaksud dengan cara sah adalah pengaruh melembaga dengan sah.

Menurut V.O. Key, Jr (1964) Partai Politik adalah Parpol dikancah Amerika cenderung menjadi kelompok khusus. Dalam kumpulan memilih secara keseluruhan, kelompok terbentuk dari orang-orang yang menganggap dirinya sebagai anggota Partai. Dalam pengertian lain istilah Partai bisa mengacu pada kelompok pekerja profesional. Kadang-kadang Partai menunjukkan kelompok-kelompok dalam pemerintahan. Seringkali Partai mengacu pada sesuatu entitas yang termasuk salah satu dari Partai-Partai didalam memilih, kelompok profesional, Partai di legislatif dan Partai di pemerintahan. Sebenarnya pemakaian yang mencakup semua ini memiliki aplikasi yang sah, karena semua jenis kelompok sebagai kelompok yang berinteraksi secara erat dan kadang-kadang mungkin sebagai satu jenis. Namun baik secara analitis dan oprasional istilah Partai paling sering mengacu pada beberapa jenis kelompok dan kita memperjelas makna dimana istilah ini digunakan.

Partai Politik adalah organisasi yang artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan

rajanya dan beberapa demikian parpol merupakan perantara yang besar yang akan menghubungkan kekuatan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas. Pendapat diatas menunjukkan parpol diartikan sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama yang bertujuan untuk memperoleh itu melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Menurut Thomas H. Stevenson dalam koesoemahatmadja (1978:80) bahwa parpol adalah kelompok orang yang terorganisir untuk mengawasi pemerintah dalam menjalankan programnya dan agar anggota-anggotanya ditempatkan dalam bidang-bidang pemerintah. Jadi parpol selain mengawasi juga Partai berusaha agar anggota Partai masuk dalam jajaran birokrasi pemerintahan. Dalam hal ini Partai politik memiliki banyak fungsi dan peran salah satu diantaranya adalah *controlling* yaitu mengawasi lembaga eksekutif apa yang menjadi program dan para birokrasi menjalankan tugas dengan baik. Peran Partai politik terbesar adalah mengumpulkan aspirasi masyarakat untuk dijadikan bahan pengawasan bahwa apakah program pemerintah sejalan dengan permintaan dari masyarakat.

Menurut William Nisbet Chambers (1967) Partai Politik dalam arti modern dapat dianggap sebagai formasi sosial yang relatif tahan lama yang berusaha meraih jabatan atau kekuasaan dalam pemerintahan, menunjukkan suatu struktur atau organisasi yang menghubungkan para pemimpin yang dipusat dengan pengikut rakyat yang signifikan di arena politik dan kantong-kantong lokal, dan menghasilkan perspektif atau setidaknya simbol-simbol identifikasi dan kesetiaan kelompok.

Menurut Leon D. Epstein (1980) “apa yang dimaksud Partai Politik adalah kelompok, meskipun terorganisir secara longgar, yang berusaha untuk memilih pemegang jabatan pemerintah dengan nama tertentu”. Sedangkan menurut Ronald Reagan (1984) “Partai Politik bukanlah persaudaraan, ini bukan seperti dasi sekolah tua yang ada dikenakan. Anda bersatu dalam Partai politik karena keyakinan tentu apa yang seharusnya dipemerintah”. Menurut Joseph Schlesinger (1991) “Partai Politik adalah kelompok yang terorganisir untuk mendapatkan kontrol atas pemerintahan atas nama kelompok itu dengan memenangi pemilihan jabatan-jabatan publik. Dan Menurut Jhon Aldrich (1995) “Partai Politik dapat dilihat sebagai koalisi elit untuk merebut dan menggunakan jabatan politik. Tapi Partai politik lebih dari koalisi. Partai Politik adalah koalisi yang terlembaga yang telah mengadopsi aturan, norma dan prosedur”.

Partai politik juga menjadi sarana mengkomunikasikan masyarakat kepada yang (diatas) dalam hal ini adalah pemerintah jadi dapat dipahami bahwa sikap yang terpenting dari Partai politik mengkomunikasikan sikap-sikap atau tuntutan yang diagregasikan oleh paratai politik terhadap pemerintah penguasa. Partai tidak harus selalu melihat keatas untuk kordinasi kepada penguasa tapi perlu dibarengi dengan sikap memperhatikan masyarakat (kebawah) dalam arti memberikan penjelasan, memperbincangkan dan menyebarkan apa yang telah direncanakan dari program pemerintah.

Artikulasi dari pada Partai politik yaitu bijak dalam menentukan sesuatu dari berbagai kelompok yang apabila mereka dapat digabungkan kepentingannya maka dalam sistem politik merupakan input bagi pemerintah yang berkuasa. Sebaliknya jika artikulasi pendapat dan sikap terpecah dan akan menimbulkan kompetisi dalam memperjuangkan kepentingan, maka dari sini peran parpol sebagai pengatur kehendak umum yang kacau. Partai-Partai politik yang menjadi keteraturan dari kekacauan para pemberi suara yang banyak jumlahnya.

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Sebagai lembaga politik, Partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah yang cukup

panjang. Bisa dibayangkan Partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara, dan baru ada di negara modern. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi, mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu, pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, yang biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan programnya.

#### b. Tugas Partai Politik

Menurut Suliswati Ismail Gani (1987) Dalam Negara yang berpaham Demokrasi, dimana masyarakat merupakan heterogen, Partai politik memiliki beberapa tugas diantaranya yaitu:

1. Tugas pokok Partai politik yaitu yang menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah.
2. Partai politik bertugas untuk menampung semua pendapat dan keinginan rakyat atau khalayak.

3. Kemudian langkah selanjutnya memilih dan merumuskan serta menyerahkan kepada pemerintah untuk dapat dijadikan politik yang akan diperjuangkan.

c. Fungsi Partai Politik

Fungsi Partai politik, salah satu diantaranya adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang No. 2 tahun 2008, Partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi.

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal Partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap Partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian dapat menjadi Partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri.

Dengan memiliki kader-kader yang baik, Partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Selain untuk tingkatan seperti itu, Partai politik juga

berkepentingan untuk memperbanyak anggotanya. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian Partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

Menurut Ramlan Subarki (1992) Fungsi utama Partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Berikut ini jumlah fungsi Partai politik:

#### 1. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

#### 2. Rekrutmen Politik

Rekrutmen Politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam system politik pada umumnya dan pemerintahn pada khususnya.

### 3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan umum dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan

### 4. Komunikasi Politik

Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintahan kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.

### 5. Pengendali Konflik

Penegendali konflik yang timbul dalam sistem politik melalui lembaga demokratis untuk mendapatkan penyelesaian dalam bentuk keputusan politik.

### 6. Kontrol Politik

Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi sesuatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.

## 2. Dominasi

### a. Pengertian Dominasi



Manusia memiliki predisposisi dasar untuk membentuk hirarki dalam masyarakat Sidanius & Parto (2011) setiap individu dari satu anggota masyarakat diatur sedemikian rupa agar memiliki kedudukan yang berbeda dalam hirarki. Hirarki adalah berdasarkan kelompok sosial atau berdasarkan karakteristik individu. Teori dominasi sosial menjelaskan bahwa setiap kelompok atau individu dominan yang berada pada bagian atas hirarki dan kelompok atau individu subordinata yang berada dibawah hirarki.

Menurut T. Liang Gie (1986:20) kekuasaan adalah dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemauan kendatipun orang lain menentanginya. Jelas bahwa makna dari dominasi adanya egoisme dalam menagambil sebuah kebijakan karena difaktorkan untuk tetap mempertahankan kemaunya meskipun orang lain memiliki pendapat yang berbeda. Kemudian pendapat dari ilmuan lain yaitu Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial, melakukan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan ini.

Dominasi diartikan sebagai penguasaan, penempatan posisi bagus dan kuat; pengaruh besar Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, (1994) kamus ilmiah populer, Arkola. Surabaya. Sedangkan eugemonia berasal dari bahasa Yunani kuno bahwa untuk menunjukkan dominasi posisi negara-negara kota secara

individual, misalnya yang dilakukan oleh negara kota Athena terhadap negara kota lainnya. (Franz Magnis – Suseno , 2003)

Arti Dominasi dalam perspektif kritis adalah suatu kekuasaan yang paling dominan, berasal dari luar manusia, sangat mempengaruhi dan turut mengatur seluruh aktifitas dan kegiatan berfikir serta tingkah laku manusia sementara manusia menerimanya tanpa kesadaran yang utuh. Pemahaman tentang arti dominasi dan jalan keluar yang ditempuh dari perspektif aliran kritis dapat membantu masyarakat untuk pertajam kaidah-kaidah kemanusiaanya yang lebih dinamis dan sejauh pembangunan di Indonesia menuju masyarakat industrial, modern , maka selama itu pula teori kritis menjadi relevan untuk diskursuskan ditataran ilmiah (Ginting Suka: 1999) .

Unsur-unsur kekuasaan/dominasi adalah kemampuan yang menjadi kekuatan pertama untuk mendominasi politik yang dikedepankan skil untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain agar dapat diikuti parpol yang ditawarnya, poin kedua bisa mendominasi kekuatan dalam hal ini kekuatan agar pengikut bisa bertahan dan menyebarkan kekuatan Partai terhadap kader-kader Partai maupun pengikutnya, yang ke tiga kepemimpinan menjadi tolak ukur untuk menunjukkan kekuatan mengembangkan wawasan kader dan pengikutnya untuk mempertahankan kekuasaan dan dominasi kekuatan Partai. Inilah beberapa unsur-unsur untuk

mempertahankan kekuasaan. Sedangkan kekuasaan politik merupakan bagian dari kekuasaan sosial, inilah ciri-ciri yang harus diambil fokus pada negara yakni memiliki kekuatan dalam negara untuk tetap menjadi penguasa yang bisa dibawa ke masa depan Partai, paling otoritatif yaitu sebagai pemegang kekuasaan harus tetap bersikap otoriter agar tetap menjadi penguasa yang tidak dapat dicampur adukan dengan kepentingan-kepentingan lain diluar kepentingan Partai.

Menurut Dahendroft ada enam ciri kelompok dominan atau pemegang kekuasaan yaitu:

1. Jumlah selalu lebih kecil dari jumlah kelompok yang dikuasai ;
2. Memiliki kelebihan kekayaan khusus untuk memelihara dominasinya berupa kekayaan materil, intelektual, dan kehormatan moral;
3. Kelas penguasa hanya terdiri dari orang-orang yang memiliki kekuasaan dominan dalam bidang politik sehingga disebut dengan elit penguasa;
4. Dalam pertentangan selalu terorganisasi dengan lebih baik dibandingkan dengan kelompok yang ditundukkan;
5. Kelas penguasa selalu berupaya memonopoli dan mewariskan kekuasaannya kepada kelas atau kelompoknya sendiri, dan;

6. Ada reduksi perubahan sosial terhadap perubahan sosial terhadap perubahan komposisi kelas penguasa.

b. Bentuk-Bentuk Dominasi

Bentuk-bentuk dominasi yang di analisis oleh Max Weber, Sidanius & Pratto, David dan Windhu . Tentu saja ada maksud tertentu untuk memperjuangkan harkat dan martabat kemanusiaan yang jatuh atas intimidasi dominasi :

1) Dominasi Birokrasi

Dominasi secara spesifik yakni yang mengacu pada kasus-kasus pemaksaan kekuasaan, tatkala seseorang pelaku menuruti perintah spesifik yang dikeluarkan orang lain. Menawarkan bentuk-bentuk hadiah, penghargaan, materil, kehormatan sosial, merupakan bentuk paling meresap dari ikatan yang mengikat antara pengikut dan pimppinan. Ditambahkan bahwa telah terjadi dominasi dalam organnisasi birokrasi yang berskala besar. Weber memandang bahwa birokrasi sudah tidak lagi efisien, akan tetapi menghasilkan korban yang bersifat psikologis atau emosional. Ikatan kesetiaan pribadi yang memberi arti dan tujuan hidup dimasa lampau dirusakkan oleh impersonalitas birokrasi. Kepuasan dan kesenangan mencetuskan perasaan secara spontan ditekan oleh tuntutan taat pada

spesialisasi sempit, rasional dan sistematis dalam sebuah kantor birokrasi. Singkatnya logika efisiensi telah menghancurkan perasaan dan emosi manusia secara sistematis (Weber, 1947 : 224-233).

Menurut Weber (1947; 330) kriteria-kriteria tipe ideal birokrasi yaitu:

1. *“A continuous organization of official functions bound by rules”* Tugas-tugas pejabat diorganisir atas dasar aturan yang berkesinambungan.
2. *“A specific sphere of competence”* tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang-bidang yang berbeda sesuai dengan fungsi-fungsinya dibidang yang berkompeten, yang masing-masing dilengkapi dengan sikap otoritas.
3. *“The organization of officers follows the principle of hierarchy”* jabatan-jabatan tersusun secara hirarkis, yang disertai dengan rincian hak-hak control dan pengaduan.
4. *“The rules which regulate the conduct of an office may be technical rules or norms”* aturan-aturan yang sesuai dengan pekerjaan

diarahkan secara teknis sesuai dengan aturan dan norma.

5. *“The members of the administrative staff should be completely separated from ownership of the means of production or administration”* anggota sebagai sumber daya organisasi berbeda atau terpisah dengan anggota sebagai individu pribadi.
6. *“There is also a complete absence of this official position by the incumbent”* pemegang jabatan tidaklah sama dengan jabatannya.
7. *“Administrative acts, decisions, and rules are formulated and recorded in writing”* administrasi didasarkan pada dokumen-dokumen yang tertulis dan hal ini cenderung menjadikan kantor (biro) pusat organisasi modern.
8. *“Legal authority can be exercised in a wide variety of different forms which will be distinguished and discussed later”* sistem otoritas legal dapat mengambil banyak bentuk aslinya, sistem tersebut tetap berada dalam suatu staf administrasi birokrat.

Dari persepetif Weber jika dipandang tidak seimbang dengan perolehannya maka dianggap tidak rasional laigi dalam menjalankannya. Karena dilihat dari susunan hirarkinya terlalu panjang lebar dan ribet. Karena banyak pejabat tidak maksimal dan tidak seimbang dalam pengerjaannya. Maka disederhanakan oleh (Mitah Thoha, 2003) dari pendapat Weber yaitu:

1. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugasnya atau kepentingan individu didalamnya.
2. Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hirarki dari atas kebawah dan kesamping. Konsukuensinya ada jabatan atasan dan bawahan dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil.
3. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hirarki itu secara spesifik berbeda satu sama lain.
4. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas (*Job*

*Description*) masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang dijalankan sesuai dengan kontrak.

5. Setiap pejabat yang diseleksi atas dasar kualifikasi, profesionalitasnya, idealnya adalah ujian melalui kompetitif.
6. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiunan dengan tingkatan hirarki jabatan yang disandangnya. Setiap jabatan bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu.
7. Terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit yang bertimbangannya yang objektif.
8. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan *resonces* instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.



9. Setiap pejabat berada dibawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.

## 2) Dominasi Sosial

Orientasi dominasi sosial adalah hasrat individu untuk menginginkan dan meraih dominasi sosial, dukungan terhadap hirarki dan dominasi berbasis kelompok dalam wujud dominasi kelompok superior atas kelompok inferior (Sidanius dan Pratto, 1999). Merujuk kepada defines ODS dari Sidanius dan Pratto ada tiga poin penting dari ODS yaitu keinginan individu untuk menguasai secara sosial, kecenderungan individu untuk mendukung struktur sosial yang hirarkis dan berdasarkan kasta, serta keinginan individu agar kelompoknya senantiasa mendominasi kelompok lain.

Adanya perbedaan antara pandangan (Li, Wang, Shi dan Shi, 2006) yang menjelaskan orang-orang yang memiliki SDO tinggi cenderung memfavoritkan ideologi dan kebijakan yang meningkatkan hirarki sementara yang memiliki SDO rendah cenderung memfavoritkan ideologi dan kebijakan yang memberantas hirarki. Sedangkan temuan dari (Sidanius dan Pratto, 1999) bertentangan dengan pandangan Li

dkk menemukan bahwa orang-orang yang memiliki SDO rendah cenderung mendukung ideologi dan kebijakan yang memberantas hirarki maka ditemukan orang-orang yang memiliki SDO rendah cenderung mendukung ideologi dan kebijakan yang memberantas hirarki maka ditemukan orang-orang yang memiliki SDO rendah justru mendukung struktur hirarkis karena mereka terbiasa dan bahkan menikmati suasana dan struktur yang hirarkis tersebut.

SDO sendiri menurut Sidanius dan Pratto (1999) ini peroleh melalui penititan di Swedia, Australia, negara-negara bekas Uni Soviet dan beberapa etnik di Amerika Serikat. kemudian dijelaskan dalam penelitian (Gazi, 2013) memiliki pandangan bahwa ada faktor signifikan dari SDO yaitu:

1. SDO akan dipengaruhi oleh keanggotaan seseorang dan idetifikasi dengan kelompok yang paling menonjol dan diatur secara hirarkis. Intinya adalah SDO sangat dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat identifikasi seseorang dalam suatu kelompok yang dominan atau suatu kelompok yang subirdinat. Semakin tinggi identifikasi terhadap

kelompok sosial yang dominan maka semakin tinggi kecenderungan SDO sekarang.

2. SDO seseorang juga di pengaruhi latarbelakang dan factor sosialisasi seperti tingkat Pendidikan, keyakinan keagamaan dan seluruh penagalaman sosialisai lainya seperti perang, depresi, bencana alam. Dengan kata lain pengalaman positif atau penagalaman negative seorang dalam berbagai konteks pergaulan sosial akan menimbulkan SDO yang tinggi atau sebaliknya akan menimbulkan SDO yang rendah.
3. Ada alasan percaya bahwa orang-orang yang dilahirkan dengan prediposisi temparamen yang berbeda. Salah satunya prediposisi itu adalah empati. Ada alasan bahwa percaya semakin tinggi empati seseorang maka semakin rendah SDOnya. Keperibadian dan temparamen merupakan determinan penting yang mempengaruhi SDO seseorang. Semakin individualis seseorang maka semakin tinggi SDOnya dam semakin pro sosial seseorang semakin rendah SDOnya.
4. Tingkat SDO seseorang tergantung pada jender. Segala yang diharapkan setara, laki-laki yang

memiliki SDO yang relatif dan secara rerata lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Maka kecenderungan untuk mendominasi lebih kuat pada pria dibandingkan perempuan.

Menurut (Lhi, Wang dan Shi dan Shi 2006) memberikan pandangan pada SDO melalui studi diperoleh di darahn Cina yang dijelaskan (Gazi, 2013). Yang menyederhanakan ada tiga faktor SDO di dataran Cina yaitu:

1. Dukungan terhadap pengeluaran yang tidak ditemukan dalam peniltian sebelumnya muncul SDO yang independent
2. Perbedaan SDO antara kelompok status tinggi (kelompok meneger) dan kelompok yang rendah (pekerja yang baru bekerja).
3. Faktor eskklusi berkorelasi secara positif dengan otorianisme den berhubungan secara negatif dengan altruism sehingga dapat dikatakan bahwa keseluruhan hasil studi memberikan bukti empiric yang memadai atas validitas

Dominasi sosial manusia memliki prediposisi untuk membentuk hirarki dalam masyarakat. Setiap indivdu dari suatu anggota masyarakat diatur

sedemikian rupa agar memiliki kedudukan yang berbeda dalam hirarki. Hirarki tersebut dapat berdasarkan kelompok sosial atau berdasarkan kelompok karakteristik individu. Teori dominasi menjelaskan setiap kelompok sosial yang luas selalu terbentuk hirarki sosial. Hal ini berarti, terdapat sejumlah kelompok atau individu yang memiliki kedudukan yang berbeda, yaitu kelompok atau individu dominan yang berada diatas hirarki dan kelompok atau individu subordinat yang berada dibawah hirarki. Kelompok atau individu dominan dikarakteristikan dengan nilai-nilai positif yang mereka miliki atau berdasarkan hal-hal yang bersifat materi atau simbolik. Kelompok atau individu dominan biasanya memiliki kekuasaan politik atau otoritas, memiliki sumber daya yang baik dan banyak, memiliki kekayaan atau status sosial yang tinggi. Bertolak belakang dengan kelompok atau individu yang dominan subordinat adalah kelompok atau individu memiliki status sosial dan kekuasaan rendah (Sidanius & Pratto, 2001).

Kemudian dominasi sosial dikembangkan untuk memahami bagaimana suatu hirarki sosial berdasarkan kelompok yang dibentuk dan dipertahankan. Teori ini

berasumsi jika kita harus memahami proses pembentukan dan pemeliharaan prasangka dan diskriminasi pada beberapa tingkat analisis, seperti pada ideologi budaya, praktek pelebagaan dan hubungan individu dengan individu lain yang ada di dalam kelompok atau diluar kelompok dan antar kelompok, kecenderungan psikologis individu dan interaksi perkembangan psikologis anatra laki-laki dan perempuan (pratto, Sidanius dan Levin, 2006: 272).

Teori dominasi sosial dikelompokan atas tiga unsur yaitu (pratto, Sidanius dan Levin, 2006: 272):

1. Sistem umur adalah orang yang dewasa memiliki kekuatan yang tidak seimbang dengan anak-anak.
2. Sistem jenis kelamin adalah dimana laki-laki memiliki kekuatan sosial, politik dan militer yang tidak seimbang disbanding dengan perempuan.
3. Sistem kesewenang-wenangan dimana sistem ini dibangun atas dasar kesewenang-wenangan yaitu terdapat perbedaan dalam mengakses nilai sosial positif dan negatif.

Maka bisa disimpulkan bahwa terciptanya dominasi sosial dari tiga unsur tersebut yang condong dalam dinamika perpolitikan yaitu adanya unsur ras, suku, agama, kelas sosial, keturunan, klan dan ide-ide.

### 3) Dominasi Politik dan Kekuasaan

Keadaan yang menguasai seseorang atau sesuatu. Tanpa disadari oleh manusia politik merupakan sub sistem sosial yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial lainnya. Pada abad ke-21 ini semakin banyak orang menyadari bahwa politik merupakan hal yang melekat pada lingkungan hidup manusia politik hadir di tengah hidup manusia.

Mengenai kekuasaan, Tawney dalam Soekanto (1984) berpendapat bahwa *“power may defined as capacity of an individual, or group of individuals, to modify the conduct of other individuals or groups in the manner in which he desires, and to prevent his conduct being modified in the manner in which he does not”* kekuasaan diartikan sebagai kemampuan individu atau kelompok individu untuk membatasi kelompok lain,

dan mencegah keinginannya dikuasai oleh kelompok lain tersebut.

Kekuasaan selalu ambigu mempesona sekaligus menakutkan (Windhu, 1992) mempesona karena berhadapan dengan seorang penguasa (raja, presiden, perdana menteri) yang berkarisma besar, berpenampilan memikat, dan dengan kharismanya itu, ia dapat mengatur dan mengendalikan *Chaos*. Dilain pihak, menakutkan karena kekuasaan cenderung busuk, disalahgunakan untuk menindas rakyat, merampas kebebasan dan kehidupan mereka. Kekuasaan ini sudah mutlak menjadi tujuan pada dirinya sendiri, tidak lagi menjadi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Menurut David (1981) seperti yang dikutip oleh (Windhu, 1992) kekuasaan adalah kemampuan atau wewenang untuk menguasai orang lain, memaksa dan mengendalikan mereka sampai mereka patuh, mencampuri kebebasan dan memaksakan tindakan dengan cara-cara khusus.

Maka dalam teori keduanya akan ada ketidak sinambungan bahwa kekuasaan itu bukan untuk dimiliki akan tetapi semua hal hanya untuk membangun relasi.



Kekuasaan menurut (Foucault, 1990) tidak dipahami sebagai konteks kepemilikan oleh suatu kelompok institutional sebagai suatu mekanisme yang memastikan ketundukan warga negara terhadap negara. Kekuasaan juga bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lainnya dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang *Powerfull* dan *powerless*. Kekuasaan bukan seperti halnya bentuk kedaulatan suatu negara atau istitusi hukum yang mengendaikan dominasi atau penguasaan secara ekstenal terhadap individu atau kelompok.

Dengan demikian kekuasaan mesti dipahami sebagai bentuk relasi kekuatan yang imanen dalam ruang dimana kekuasaan itu beroperasi. Kekuasaan mesti dipahami sebagai suatu yang melanggengkan relasi kekuatan itu., yang membentuk rantai atau sistem atau relasi kekuatan itu, atau justru yang mengisolasi mereka dari yang lain dari suatu relasi kekuatan. Oleh karena itu kekuasaan merupakan strategi diman relasi kekuatan adalah efeknya.

Maka terdapat dalam buku *The History of Sexuality vol. I* Foucault menunjukkan ada lima

perposisi mengenai apa yang dimaksud dengan kekuasaan, yaitu (1990: 94-95):

1. Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, atau diabdikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan dapat juga pnah; akan tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak.
2. Relasi kekuasaan bukanlah relasi yang structural hirarkis yang mengandaikan ada yang menguasai dan ada yang dikuasai
3. Kekuasaan datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi distingsi binary opistions karena kekuasaan itu mencakup dalam keduanya.
4. Relasi keuasaan bersifat intensional dan non-subjektif
5. Dimana ada kekuasaan disitu pula ada anti kekuasaan (*resistance*). Dan resistensi tidak berada diluar relasi kekuasaan itu, setiap orang berada dalam kekuasaan, tidak ada satu jalan pun untuk keluar darinya.

### c. Dampak Dominasi

Menurut Galtung dalam Windhu (1992) Ada empat aspek yang terjadi apabila sering digunakan kekuasaan untuk dominasi;

1. Eksploitasi penguasaan atau penarikan keuntungan secara tidak wajar. Terjadi jika totalitas jumlah biaya dan keuntungan kegiatan dari berbagai kelompok yang berbeda sehingga beberapa kelompok memperoleh keuntungan lebih banyak dari yang lainnya.
2. Penetrasi dipahami bahwa masuknya pengaruh dari sesuatu kekuatan yang dominan terhadap yang minor. Dalam konteks sebuah negara masuknya pengaruh negara kuat dalam negara yang dikuasai.
3. Fragmentasi merupakan suatu cara yang digunakan oleh suatu kelompok untuk menguasai kelompok lainnya, suatu pemerintah dapat menguasai beberapa negara lainya dengan cara memecah belah.
4. Marginalisasi untuk membedakanya dengan fragmentasi Galtung mencontohkan sebagai cara yang ditempuh dengan membentuk perkumpulan didalam dan diluar. Di satu pihak, keputusan-keputusan penting mengenai seluruh dunia akan diambil oleh perkumpulan

didalam (masyarakat Eropa) dan dilain pihak terdapat sekelompok kecil negara-negara Eropa yang mengikuti kebijakan non imprealis, namun mereka tergabung dalam struktur yang sifatnya eksploitatif terhadap perkumpulan diluar, yaitu negara-negara yang dikuasai.

#### 5. Hegemoni Kekuasaan

Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme consensus (*consenso*) dari pada melalui penindasan terhadap kelas sosial lain. Ada berbagai cara yang dipakai, misalnya melalui yang ada di masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur kognitif dari masyarakat itu. Itulah sebabnya hegemoni pada hakekatnya adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam karangka yang ditentukan. (Gramsci, 1976:244). Dalam konteks tersebut Gramsci lebih menekankan pada aspek kultural (ideologis). Melalui produk-produknya, Hegemoni menjadi satu-satunya penentu dari sesuatu yang dipandang benar baik secara moral maupun

intelektual. Hegemoni kultural tidak hanya relasi antar negara tetapi dapat juga terjadi dalam hubungan berbagai kelas sosial yang ada dalam suatu negara.

Melalui konsep hegemoni dari Gramsci berargumentasi bahwa ada dua perangkat kerja yang dibutuhkan agar kekuasaan langgeng dan abadi. Yaitu:

1. Perangkat kerja yang dapat mampu melakukan tindak kekerasan yang bersifat memaksa atau dengan kata lain kekuasaan membutuhkan perangkat kerja yang bernuansa *law enforcement*, perangkat kerja yang beratama ini biasanya dilakukan oleh purnata negara (state) melalui Lembaga-lembaga seperti hukum, militer, polisi dan bahkan penjara.
2. Perangkat kerja yang dapat membujuk masyarakat bersama purnata-purnata untuk taat pada mereka yang berkuasa melalui kehidupan beragama, Pendidikan, kesenian dan bahkan keluarga (Heryanto, 1997). Perangkat kerja ini biasa terjadi dan dilakukan oleh purnata masyarakat sipil (civil society) melalui Lembaga-lembaga

masyarakat LSM, Organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban dan kelompok-kelompok kepentingan (*Groups*).

Hegemoni terbagi tiga bidang, yaitu ekonomi (*economic*), negara (*state*), dan rakyat (*civil society*) (Bocock, 1986). Ruang ekonomi menjadi fundamental. Namun, dunia politik yang menjadi arena dari hegemoni, juga menampilkan momen perkembangan tertinggi dari sejarah kelas. Dalam hal ini pencapaian kekuasaan negara, konskuensi yang dibawanya bagi kemungkinan perluasan dan pengembangan penuh dari hegemoni itu telah muncul secara parsial. Memiliki sebuah signifikasi yang khusus. Negara dengan segala aspeknya, yang diperluas mencakup wilayah hegemoni, memberikan kelas yang mendirikan baik prestise maupun tampilan kesatuan sejarah kelas penguasa dalam bentuk konkret, yang dihasilkan dari hubungan organik antara negara atau masyarakat politik dan *civil society*.

Hegemoni satu kelompok atas kelompok-kelompok lainya dalam pengertian Gramscian bukanlah sesuatu yang dipaksakan. Hegemoni itu harus diraih melalui upaya-upaya politis, kultural dan

intelektual guna menciptakan pandangan dunia atau ideologi menjadi sebuah instrumen dominasi yang memberikan pada kelompok penguasa legitimasi untuk berkuasa (Sugiono, 1999).

Adapun bentuk-bentuk kekuasaan menurut Frech dan Reven (dalam Basrowi, 2005: 114) dibagi menjadi lima. Bentuk-bentuk kekuasaan menurut Frech dan Reven yaitu:

1. Kekuasaan paksaan (*Coercive power*)

Bentuk ini merupakan kemampuan untuk memberikan hukuman bagi bawahan yang tidak mengikuti pemimpinnya. Dari sisi orangnya ia mempunyai penguasaan, kemampuan untuk menghukum atau memermalukan seseorang yang tidak melakukannya dan orang lain mempunyai rasa takut terhadap orang tersebut. Alasannya untuk mentaati kekuasaan paksaan berupa rasa takut, baik fisik maupun non fisik, seperti dipukul, diancam, ditangkap, dipenjarakan, atau dibunuh dan non fisik misalnya kehilangan pekerjaan, dikucilkan dan intimidasi.

## 2. Kekuasaan Imbalan (*Insentif power*)

Pematuhan dicapai berdasarkan kemampuan untuk membagikan imbalan yang dipandang orang lain sebagai berharga. Imbalan adalah sesuatu yang meningkatkan frekuensi kegiatan seorang pegawai. Sesuatu dinamakan imbalan atau bukan, tergantung pada keseluruhan pengaruh terhadap perilaku pegawai. Jika kerja seorang pegawai diikuti oleh sesuatu yang dikerjakan lebih sering di saat kemudian setelah sesuatu, maka sesuatu tersebut imbalan. Imbalan dalam pekerjaan memungkinkan sebuah kinerja akan diulang pada waktu yang akan datang.

## 3. Kekuasaan yang sah (*legitimate power*)

Kekuasaan yang diturunkan karena wewenang, biasanya mencakup kekuasaan paksaan. Upaya untuk membedakan antara cara-cara yang dapat dibenarkan dengan yang tidak dapat dibenarkan, tidak



adacampur tangan orang lain dan memberikan oleh seorang.

4. Kekuasaan ahli (*expert power*)

Kekuasaan berdasarkan pada keahlian khusus. Seseorang yang secara luas diakui dapat diandalkan sumber Teknik atau keahlian untuk menilai atau memutskan dengan tepat, adil, atau bijaksana dan diyakini memberikan kewenangan atau status oleh rekan-rekan atau publik. Seorang pakar berdasarkan pelatihan, pendidikan, profesi, publikasi atau pengalaman yang diyakini memiliki pengetahuan khusus dari suatu subjek lebih dari itu dari rata-rata orang lain.

5. Kekuasaan referen (*Referen Power*)

Pengaruh yang didasarkan pada pemilikan sumber daya atau ciri pribadi yang diinginkan oleh seorang. Referen power (kekuasaan rujukan) adalah kekuasaan yang timbul karena karisma, karakteristik individu, keteladanan atau kepribadian yang menarik.

## **F. Definisi Konseptual**

a. Partai Politik

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Sebagai lembaga politik, Partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah yang cukup panjang. Bisa dibilang Partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara, dan baru ada di negara modern.

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi, mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu, pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

b. Dominasi

Partai politik cenderung memiliki kekuatan dalam negara untuk tetap menjadi penguasa yang bisa dibawa ke masa depan. Partai, paling otoritatif yaitu sebagai pemegang kekuasaan harus tetap bersikap otoriter agar tetap menjadi penguasa yang tidak dapat dicampur adukan dengan kepentingan-kepentingan lain diluar kepentingan Partai.

## **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan uraian- uraian konsep yang sudah dirumuskan dalam bentuk indikator- indikator agar lebih memudahkan operasionalisasi dari sudut penelitian (Siagian, 2015). Definisi operasional adalah petunjuk pelaksanaan tentang bagaimana cara mengukur suatu variabel (Singarimbun, 2015).

Untuk mengukur variable tersebut penulis berpacu pada kerangka teoritis tentang dominasi yang diklasifikasikan dalam empat dimensi yakni Dominasi Birokrasi (Weber, 1947), Dominasi Sosial (Sidanius & Pratto, 2001), Dominasi Politik (David, 1981) serta untuk mengukur dampak dari adanya dominasi kekuasaan penulis menggunakan kerangka teoritik yang dikemukakan oleh (Windhu, 1992).

### **a. Dominasi**

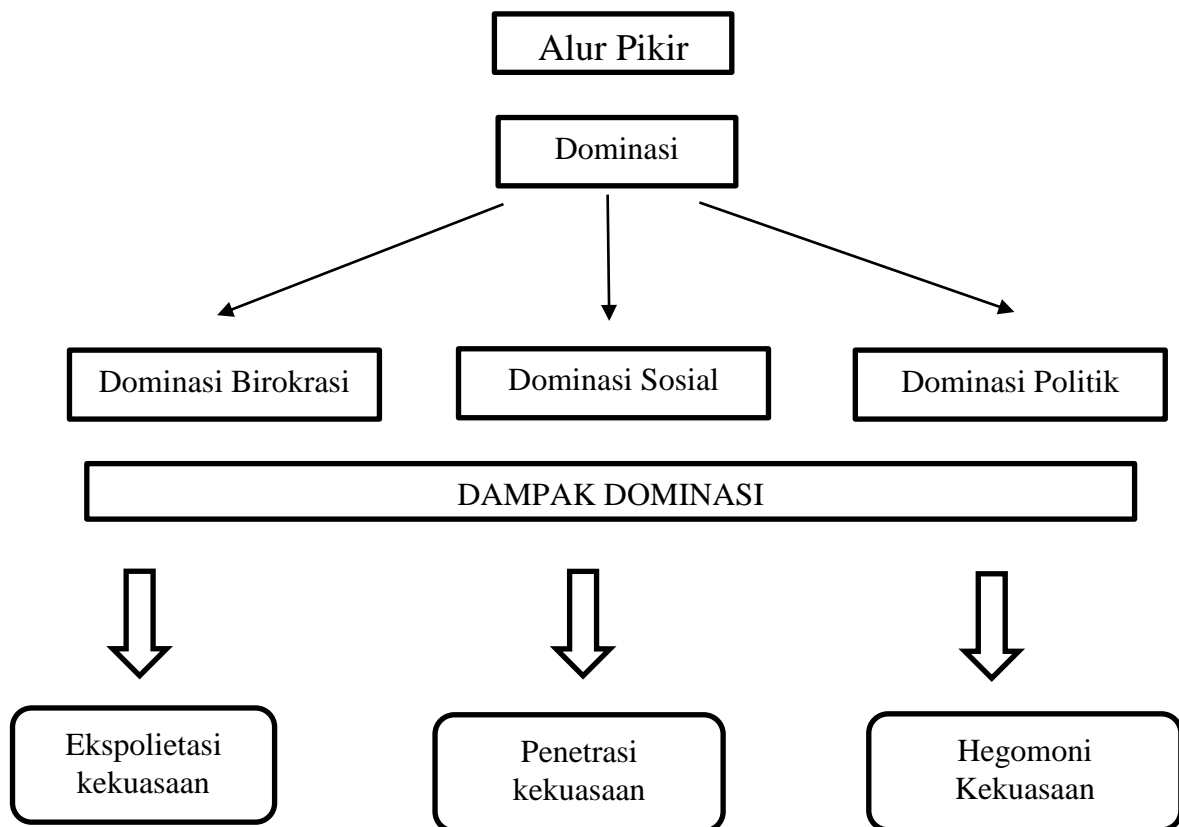
1. Dominasi Birokrasi
2. Dominasi Sosial
3. Dominasi Politik dan Kekuasaan

### **b. Dampak Dominasi**

1. Eksploitasi Kekuasaan
2. Penetrasi Kekuasaan
3. Hegemoni Kekuasaan

## **H. Alur Pikir**

Untuk memperjelas kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memperjelas alur pikir penelitian. Selanjutnya dapat dilihat dari ilustrasi gambar berikut.



## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses panjang yang berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang untuk memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori dan konsep. Dalam mewujudkan penelitian tersebut maka dilakukan pemilihan metode yang cocok untuk suatu penelitian. Sesuai dengan sifat dan karakter permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang terjadi pada subjek penelitian dalam konteks yang ilmiah. Konteks khusus yang dimaksud adalah yang dimaksud adalah bagaimana dominasi Partai Golkar Kabupaten Bone.

Menurut (Nawawi, 2015) metode deskriptif adalah dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seperti individu, lembaga, kelompok dan masyarakat pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagainya.

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang merupakan tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung dari pengamatan manusia baik dalam kawasannya atau peristilahannya. Oleh karena itu dalam penelitian ini bisa terjadi perbedaan penginterpretasian satu sama lain.

Penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan data yang obyektif dalam rangka mengetahui dan memahami isi penelitian (Sugiono, 2010)

## 2. Objek Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian dengan objek Partai Politik Golkar di Kabupaten Bone. Kekuatan Partai politik Golkar di Kabupaten Bone masih mendominasi massa terbanyak setelah pasca reformasi. Melihat kekuatan Golkar pasca reformasi perolehan suara Golkar cukup drastis menurun dalam skala nasional. Namun Golkar kembali bangkit di beberapa wilayah daerah. Bone merupakan ladang suara Golkar semenjak pasca reformasi karena dominasi kekuatan politik Golkar sehingga para elit-elit politik sampai saat ini

masih menjadikan Golkar sebagai tulang punggung untuk mengantarnya dikursi pemerintahan.

### 3. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer menurut (Umar, 2003 : 56) adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber melalui wawancara dan observasi (responden, informan). Informan adalah sumber data yang berupa orang. Orang yang dalam penelitian ini dipilih dengan harapan dapat memberikan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas jawaban dari responden.

#### b. Data sekunder

Data skunder yaitu data yang diambil dari dokumen dan laporan- laporan yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen adalah segala bentuk catatan tentang berbagai macam peristiwa atau keadaan dimasa lalu yang memiliki nilai atau arti penting dan dapat berfungsi sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Sumber tertulis dapat terbagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber arsip dokumen pribadi dan dokumen resmi. (Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan dan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D, 2010).

### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan langsung untuk tujuan tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (narasumber) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Maksud dari mengadakan wawancara seperti itu telah ditegaskan oleh (Guba, 2015) antara lain : mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain- lain, kebulatan : merekonstruksi kebulatan- kebulatan demikian sebagai yang dialami 41 masa lalu; memproyeksikan kebulatan- kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

Patton, (2015) membagi wawancara kedalam tiga jenis, wawancara pembicaraan informal, pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, dan wawancara



baku terbuka. Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara pembicaraan informal dan pedekatan menggunakan petunjuk umum wawancara.

Data penelitian ini didapatkan dari wawancara langsung dengan:

1. Ambo Dalle: Wakil Bupati, Wakil Ketua DPD Golkar
2. A. Irwansyahh: Pengurus Partai Golkar
3. Suaidi: Anggota DPRD Fraksi Demokrat
4. H. Rahman: Ketua Fraksi Gerindra
5. Abu Khair: Ketua Fraksi Nasdem
6. Ardianto: Alumni HMI Cabang Bone
7. Feri Afrisal: Pengurus Partai Golkar

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi Menurut (Arikunto, 2015), dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumen merupakan salah satu

sumber data karena bisa dimanfaatkan untuk menafsirkan, menguji dan meramalkan. Dokumen digunakan untuk keperluan penelitian, menurut (Lincoln, 2015) karena alasan :

- (a) Dokumen digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendukung,
- (b) berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian,
- (c) berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks,
- (d) dokumen harus dicari dan ditemukan,
- (e) hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

#### 5. Unit Analisa

Penelitian objektif tentu butuh dukungan informasi dan data yang pasti dan jelas. Dengan dukungan kejelasan dan mendeskripsikan hasil penelitian “Dominasi Partai Golkar Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Pasca Reformasi” dilakukan wawancara yaitu:

- a. DPD II Partai Golkar Wilayah Kabupaten Bone
- b. DPRD Kabupaten Bone
- c. LSM Kabupaten Bone
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
- e. Pergerakan Mahasiswa

#### 6. Sistematika Penulisan

Laporan hasil penelitian ini akan terdiri dari empat bab,  
meliputi :

**Bab I Pendahuluan** (Latar Balakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Teori, Definisi Konseptual, Definisi Operasional, Metode Penelitian)

**Bab II Deskriptif Objek Penelitian**

**Bab III Hasil Pembahasan** (pembahasan dan penelitian)

**Bab IV Penutup** (kesimpulan dan saran)

**Daftar Pustaka**